

BAB I

PENDAHULUAN

Skripsi dimulai dengan bab pendahuluan, yang memberikan gambaran umum tentang penyusunan sesuai dengan judulnya. Setiap bab memiliki pembabakan, yang dibagi menjadi tujuh sub pembahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, kegiatan kerjasama adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan zaman yang pesat membawa banyak permasalahan baru yang lebih kompleks. Dalam skala yang lebih luas, tiap negara dan daerah tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa adanya bantuan dari daerah atau negara lain. Pada awalnya, kerjasama umumnya dilakukan antar negara, namun, dengan adanya globalisasi kerjasama bisa dilakukan oleh berbagai aktor non-negara seperti Organisasi Internasional non Pemerintah (INGO's), Perusahaan Multinasional (MNC's) dan aktor-aktor individu lain dalam skala internasional.

Globalisasi membawa sebuah fenomena baru dalam kerjasama internasional salah satunya adalah paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan sebuah kegiatan hubungan luar negeri pemerintah lokal daerah atau *sub-state government* dengan aktor luar negeri dalam rangka kepentingan secara spesifik (Wolff, 2009). Dengan lunturnya batas-batas negara di era globalisasi, pemerintah daerah memiliki sebuah peluang yang besar untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan melakukan *bypass* tanpa perlu melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Menurut Lecours, ada tiga kelompok praktik paradiplomasi. Pertama, kolaborasi antara pemerintah regional atau sub-negara yang berfokus pada investasi dan perluasan pasar. Jenis pertama dari paradiplomasi ini tidak memiliki unsur-unsur yang kompleks, seperti motif politik dan kebudayaan. Jenis kedua melibatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Jenis ketiga adalah paradiplomasi yang rumit dan melibatkan motif politik dan identitas wilayah yang khusus. Untuk menunjukkan identitas nasional mereka yang unik dan independen, kerjasama dilakukan dalam hubungan paradiplomasi ketiga ini. (Lecours, 2008).

Indonesia sendiri menunjukkan dukungan terhadap paradiplomasi melalui serangkaian undang-undang yang memfasilitasi kegiatan luar negeri bagi pemerintah daerah. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berlaku hingga sekarang. Dalam Pasal 101 Ayat 1 disebutkan bahwa DPRD provinsi memiliki tugas dan

wewenang untuk mempertimbangkan dan memberi pendapat serta persetujuan dalam rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi.

Bentuk kegiatan otonomi daerah di tingkat internasional diantaranya adalah kerjasama *Sister City* dan kerjasama ekonomi melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). Di Indonesia, kerjasama *Sister City* bukanlah suatu hal yang asing, hal ini ditunjukkan dengan jumlah kerjasama yang cukup banyak diantaranya adalah kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu dan Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu. Tidak hanya *Sister City*, Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* juga termasuk dalam lingkup paradiplomasi apabila kerjasama dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan ikut berpartisipasi dalam promosi untuk menarik investor asing (Harakan, 2020).

Kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu berfokus pada pengelolaan lingkungan diantaranya adalah program Water Management (2013); Penggalian Potensi Kota (2014); dan Pelestarian Hutan dan Pengembangan Ecowisata (2018). Kerjasama ini juga sebagai langkah Surabaya untuk mencapai Surabaya *Green City* (Dzazira, 2022). *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu juga berfokus pada pengelolaan lingkungan terutama pada permasalahan air bersih. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening di Bandung ditunjuk sebagai sektor utama dalam program kerjasama *capacity building* dengan pemerintah Kota Hamamatsu dalam mengelola pencegahan kebocoran air minum pada tahun 2017-2019 (Primawanti, Dermawan, Rahman, & Khurrahman, 2023). Kerjasama paradiplomasi *Foreign Direct Investment* juga terdapat di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dimana OPIC (*Overseas Private Investment Corporation*) memberikan bantuan pinjaman dana sebesar 120 Juta US Dollar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) (Ahmad Harakan, 2021).

Permasalahan di masa kini tidak hanya berfokus pada isu *high politics*, isu-isu *low politics* seperti permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan semakin banyak disuarakan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi sorotan banyak pihak, terutama negara-negara maju yang secara umum sudah mapan di berbagai bidang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam komitmennya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan membuat sebuah rancangan pembangunan berkelanjutan yang dinamakan *Sustainable Development Goals* (selanjutnya ditulis sebagai SDGs). SDGs memiliki 17 poin utama yang memiliki tujuan untuk pembangunan global yang mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet (Pusat Studi

Perencanaan Pembangunan Regional, 2023). Pemerintah Indonesia berkomitmen dengan SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, target SDGs yang menjadi indikator utama terdapat pada poin nomor 6 (Air bersih dan sanitasi layak), poin nomor 7 (Energi bersih dan terjangkau), dan poin 11 (Kota dan pemukiman yang berkelanjutan).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi paradiplomasi dalam upaya pencapaian target SDGs di Indonesia?

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Teori Kerjasama Internasional

Setiap negara membutuhkan negara lain, seperti halnya manusia membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu, jelas bahwa setiap negara akan memiliki hubungan, interaksi, atau kegiatan kerjasama dengan negara lain. Hubungan internasional atau kerjasama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis hubungan yang terjadi antara negara-negara di seluruh dunia. Menurut buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, karena ketergantungan antar negara, hubungan internasional harus terjadi. Oleh karena itu, suatu negara tidak akan dapat menutup dirinya dari dunia luar karena ketergantungannya (Perwita & Yani, 2005).

Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai hal yang sederhana dalam buku dengan judul *International Politics: A Framework for Analysis*. K. J. Holsti juga memberi definisi lain untuk kerjasama internasional, seperti berikut:

a. Pendapat bahwa dua atau lebih tujuan, prinsip, atau tujuan dapat bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu pada saat yang sama, meskipun masing-masing dari mereka mempromosikan atau memenuhi satu tujuan.

b. Keyakinan suatu negara bahwa kebijakan yang dibuat oleh negara lain akan bermanfaat bagi kepentingannya dan nilai-nilainya.

c. Persetujuan atau masalah tertentu yang terjadi antara dua negara atau lebih karena persamaan atau perbedaan kepentingan

- d. Peraturan transaksi yang akan datang, baik resmi maupun tidak resmi, yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1967).

1.3.2 Konsep Paradiplomasi

Studi hubungan internasional mencakup berbagai bidang. Diplomasi adalah subjek yang sangat dipelajari dan sangat penting dalam studi hubungan internasional. Dengan kata lain, itu adalah usaha, seni, dan cara bernegosiasi. Diplomasi berkembang seiring dengan zaman, dengan cara dan aktor baru. Ketika pemerintah non-pusat akhirnya memasuki perdebatan internasional, disiplin ilmu hubungan internasional semakin luas. Pertengahan 1980-an menunjukkan perubahan dalam hal ini karena munculnya perdebatan teoritis yang lebih luas, yang menghasilkan berbagai pendekatan dan sudut pandang analitis yang lebih luas tentang bagaimana aktor internasional dipertimbangkan (Alvarez, 2020).

Menurut beberapa ahli, paradiplomasi terkait dengan diplomasi dan didefinisikan sebagai kegiatan internasional langsung di mana pemerintah daerah melengkapi, menduplikasi, atau menantang diplomasi negara-negara. Tidak semua pemerintah daerah melakukan paradiplomasi dengan cara yang sama karena setiap pemerintah daerah memiliki cara unik untuk melakukan hubungan internasional. Menurut Lecours, ada tiga kategori praktik paradiplomasi. Yang pertama terfokus pada tujuan ekonomi, seperti investasi secara timbal balik, perluasan pasar, dan pengembangan investasi ke luar negeri. Yang kedua mencakup hubungan yang mencakup berbagai domain, seperti pendidikan, ekonomi, kebudayaan, alih teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Hubungan ini didasarkan pada model kerja sama internasional yang terdesentralisasi, juga dikenal sebagai "kerja sama yang terdesentralisasi." Ketiga, paradiplomasi adalah proses yang rumit yang mencakup motivasi politik serta identitas nasional wilayah tertentu (Lecours, 2008).

Paradiplomasi adalah fenomena baru dalam penelitian hubungan internasional. Ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh entitas sub-nasional di arena internasional untuk memenuhi kepentingan internasional mereka (Wolff, 2009). Selain itu, dalam bukunya, Takdir Ali Mukti menyatakan bahwa paradiplomasi di era otonomi daerah menunjukkan pergeseran dari pola pengelolaan pemerintah daerah yang berfokus pada *outward looking* (Mukti, 2020). Singkatnya, istilah "paradiplomasi" digunakan untuk menggambarkan jenis baru partisipasi sub-nasional dalam hubungan internasional. Ini juga dikenal sebagai partisipasi unit konstituen

atau wilayah negara nasional dalam urusan internasional. Selain itu, Wolff menyatakan bahwa, karena entitas sub-nasional umumnya tidak dianggap sebagai subjek hubungan internasional dalam disiplin hubungan internasional, perkembangan ini sangat menantang secara konseptual dan praktis. Contoh tindakan diplomatik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan *Sister City*; 2. *Foreign Direct Investment*; 3. Proyek bersama; dan 4. Mengirim delegasi.

1.3.3 Teori Hijau (*Green Theory*)

Pada tahun 60-an, sebagian besar orang mengakui bahwa "tragedi bersama" atau "tragedy of the commons"—ide bahwa manusia akan menggunakan sumber daya alam seperti tanah, air, hewan, dan tumbuhan secara berlebihan telah menyebabkan krisis lingkungan global. Jumlah bencana dan kedaruratan lingkungan cenderung akan meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan pertumbuhan populasi yang membutuhkan sumber daya alam yang besar. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama tentang masalah ini diadakan pada tahun 1970 di Stockholm yang menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup global.

Banyak teori dibangun dalam studi hubungan internasional untuk menjelaskan politik internasional. Teori-teori saat ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan fenomena atau masalah yang terjadi di dunia internasional. Namun, teori-teori HI tradisional gagal menjelaskan fenomena dan masalah politik internasional, yang menyebabkan munculnya teori baru atau pengembangan dari teori-teori HI tradisional.

Teori hijau, juga dikenal sebagai teori hijau, muncul sebagai tanggapan terhadap masalah krisis lingkungan hidup global.

Dalam teori hijau, lingkungan hidup menjadi kepentingan yang utama sebagai dasar pemikiran. Dapat disepakati bahwa kerusakan lingkungan telah terjadi sebagai akibat dari berbagai aktifitas manusia. *Green Theory* hadir sebagai sebuah kritikan terhadap teori-teori dalam hubungan internasional yang terlalu berfokus pada manusia atau *human centered*. Hugh C. Dyer mengatakan bahwa *green theory* dengan paham ekosentrisme menentang paham antroposentrisme yakni pemikiran yang berpusat pada manusia (Dyer, 2020).

Paham ekosentris yang menjadi dasar dari *green theory* terpusat pada lingkungan hidup dan ekologi. *Green theory* hadir sebagai alat untuk membantu memahami dan mendalami bagaimana hubungan lingkungan, ekonomi, dan negara (Dyer, 2020). Penolakan ekosentrisme

terhadap antroposentrisme disebabkan karena paham antroposentrisme cenderung eksploitatif terhadap lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek manusia.

(Goodin, 1992) mengatakan bahwa teori hijau unik karena mengacu pada perspektif moral yang konsisten. Teori hijau ini juga biasa disebut sebagai teori nilai hijau dan itu entitas yang berbeda dari teori praktik atau institusi politik. Seperti, prinsip-prinsip moralitas hijau dapat mengusulkan bahwa pengembangan material oleh manusia harus dibatasi untuk melestarikan hal-hal non manusia yang dalam konteks ini adalah lingkungan. Hal ini akan memberi batasan bagi kemampuan kita untuk mengkonsumsi sumber daya secara berlebihan. Kebutuhan untuk membatasi kebebasan konvensional menunjukkan sikap yang mengunggulkan lingkungan. Dengan cara ini, teori hijau bersifat ekosentris.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang hingga kerangka berpikir, maka kontribusi paradiplomasi adalah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama internasional.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan. Metode kualitatif mampu memberikan gambaran yang jelas tentang Paradiplomasi sebagai subjek yang diteliti. Pada tahap pengumpulan data, penulis dapat melakukan studi literatur dengan menggunakan jurnal-jurnal dan media yang tersedia yang terkait dengan paradiplomasi dalam pencapaian SDGs di Indonesia.

Setelah itu untuk menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan analisis isi. Dalam hal ini analisis tersebut guna menemukan mengapa paradiplomasi berperan penting dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia. Beberapa diantaranya hasil dan proses dari paradiplomasi di berbagai kawasan di Indonesia yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Harapan dari penelitian ini adalah agar berhasil memberikan pemahaman terkait peran paradiplomasi dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penggunaan 3 studi kasus dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan kerjasama yang berbeda-beda pada tiap kasus sehingga akan memberikan penggambaran yang luas terkait kontribusi paradiplomasi dalam SDGs. Tiga kota yang dipilih juga berdasarkan dari karakteristik yang berbeda diantara masing-masing kota dimana Kota Surabaya sebagai

representasi kota metropolitan dan industri, Kota Bandung sebagai kota yang identik dengan pariwisata, dan Kabupaten Sidrap sebagai kabupaten yang terletak di luar Pulau Jawa.

1.6 Jangkauan Penelitian

Untuk memberikan fokus dan batasan dalam pembahasan penelitian ini penulis menganalisis tentang kerjasama pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Salah satu syarat penting untuk penulisan ilmiah adalah penelitian ditulis secara sistematis. Hasil penelitian hanya akan ditulis dengan baik jika disajikan dengan cara yang sistematis. Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Jangkauan Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dibahas dalam Bab I.

BAB II: Pada Bab II membahas tentang paradiplomasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia yakni Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Kabupaten Sidrap yang memiliki fokus dalam pembangunan berkelanjutan, serta berisi dengan pembahasan dan temuan dari kontribusi paradiplomasi terhadap upaya pencapaian target SDGs di Indonesia

BAB III: Berisikan kesimpulan dari temuan dan pembahasan dari bab sebelumnya.